

Pelayanan PJU Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Untuk Beberapa Ruas Jalan



Jombang - Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki 12 orang petugas perbaikan PJU yang dibagi menjadi 3 regu, masing-masing regu perbaikan PJU dilengkapi dengan peralatan perbaikan dan mobil tangga hidrolis untuk mengatasi masalah-masalah terkait Penerangan Jalan Umum(PJU) di beberapa ruas jalan wilayah Kabupaten Jombang, begitulah keterangan Kadishub Kabupaten Jombang, Budi Winarno pada Selasa(28/02/2023).

Curah hujan yang tinggi seringkali menimbulkan konsleting pada beberapa arus listrik yang tersambung di titik-titik koordinat PJU pada beberapa ruas jalan di Kabupaten Jombang, namun beberapa kali juga terlihat para tim perbaikan PJU dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan sigap memperbaiki dan mengontrol keadaan dan kondisi perangkat PJU di tiap-tiap titik.

Kepala Dinas Perhubungan, Budi Winarno

memaparkan ketika curah hujan yang tinggi dan angin kencang sangatlah berpotensi mengakibatkan ranting-ranting pohon patah dan memutus jaringan kabel PJU,"curah hujan tinggi biasanya bersamaan dengan angin kencang, juga petir yang menyambar tentunya dapat merusak komponen lampu LED PJU sehingga lampu terbakar", terang Budi Winarno.

Lebih lanjut, Kadishub Kabupaten Jombang menghimbau pada masyarakat Jombang apabila mengetahui terjadinya gangguan pada Penerangan Jalan Umum(PJU), Diharapkan kerjasamanya untuk dapat menghubungi kontak layanan gangguan PJU," untuk warga Jombang kami harapkan kerjasamanya, apabila mengetahui ada gangguan pada PJU diwilayahnya untuk dapat menghubungi kontak layanan gangguan PJU, yaitu pada nomor whatsapp 082233691119 dan kami share di link instagram juga yaitu pada link @dishubjombang, terimakasih", pungkask Budi Winarno.(gus).



Monitoring Kesiapan Jalur Lebaran Idul Fitri 2023 Kadishub Jombang Turut Hadir Dalam Rakor Di Malang



Jombang - Rapat monitoring dan evaluasi serta koordinasi tentang kesiapan jalur lebaran idul fitri 2023 pada ruas jalan nasional pulau jawa, Dipimpin oleh Kombes Pol Indra Jafar, S.I.K, M.Si, bertempat di Hotel Savana Malang, Jumat(24/02/2023).

Sebagai informasi, puasa Ramadhan diperkirakan akan dimulai pada 21 Maret 2023 dan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 21 April 2023.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan dengan tujuan, yaitu memantau kondisi jaringan Nasional dan jalan tol di wilayah Pulau Jawa. Pemaparan oleh Kasatlantas Polres Malang mengawali pelaksanaan rapat, dengan menggambarkan kondisi, situasi, dan potensi terjadinya kemacetan pada ruas jalan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten akibat adanya persimpangan sebidang Rel

Kereta Api, adanya aktifitas dan kegiatan masyarakat disepanjang ruas jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti lokasi pasar, tempat Pendidikan, tempat Kesehatan, dan lainnya.

Lebih lanjut, dari pihak Jasa Marga selaku pengelola jalan tol juga memaparkan tentang kesiapan pelayanan dan keamanan disepanjang jalan tol pada saat H-7 dan H+7 hari raya Idul Fitri 1444 H.

Budi Winarno selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, yang juga turut hadir dalam rapat koordinasi kesiapan jalur lebaran Idul Fitri 2023 menyampaikan harapan akan adanya sinergitas dan koordinasi lintas sector dimasing-masing Kabupaten atau Kota yang berkaitan dengan kesiapan pengamanan pada hari raya Idul Fitri 1444 H, "setelah rapat koordinasi ini termasuk diwilayah saya sendiri, yaitu Kabupaten Jombang", pungkask Budi.(gus)



Magetan Terima Adipura, Bupati Suprawoto Apresiasi Tingginya Kesadaran Warga Magetan Menjaga Kebersihan

SeputarKita – Setelah ditiadakan selama dua tahun akibat pandemi, Pemerintah kembali memberikan penghargaan Adipura 2022 kepada sejumlah daerah. Sebanyak 150 kabupaten dan kota menerima penghargaan Adipura untuk berbagai kategori.

Pemberian penghargaan Adipura tahun 2022 diselenggarakan di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Penilaian Adipura terbagi dalam sejumlah indikator. Salah satunya status Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) terkait pengelolaan sampah. Tanpa Jakstrada, indikator lain tak akan dinilai. Selain itu, operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA), luasan ruang terbuka hijau, dan kapasitas pengelolaan sampah turut diperhitungkan.

Dari berbagai indikator tersebut, Kabupaten Magetan menjadi salahsatu penerima Piala Adipura. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan, Ir. Hergunadi, MT.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan penghargaan bukan tujuan utama, namun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan jauh lebih penting.

"Alhamdulillah masyarakat Magetan telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan. Ini penting karena tanpa peran serta dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan ya penghargaan Adipura ini belum tentu kita peroleh," katanya.

"Penghargaan Adipura ini diperoleh betul-betul



karena kinerja kita semua, jangan kita bekerja itu memburu hadiah saja, tetapi harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Semisal tidak mendapatkan Adipura juga tidak apa-apa, yang penting Magetan harus tetap dibuat bersih.

Bupati Suprawoto sangat merasa bangga kepada masyarakat Magetan, yang ikut menjaga kebersihan sehingga Kabupaten Magetan mendapatkan kembali penghargaan Adipura.

"Alhamdulillah sekarang masyarakat Magetan sudah sadar kebersihan. Dan tanpa peran serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya, penghargaan Adipura ini belum tentu kita peroleh," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Mukhlissun menuturkan bahwa salah satu poin plus keberhasilan Pemkab Magetan meraih Piala Adipura adalah

Instruksi Bupati No. 1 tahun 2019.

"Pak Bupati mengeluarkan instruksi tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Wujudnya adalah bank sampah. Dengan instruksi bupati ini, sampah selesai di desa atau kelurahan," ujar Saif.

Menurut Saif, di Kabupaten Magetan saat ini sudah ada 413 Bank Sampah masyarakat yang terdaftar. Juga telah dikukuhkan DPD Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) Magetan periode 2022-2025.

"Keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam pengelolaan sampah itu sangat penting. Pemerintah butuh semangat dan dukungan warga masyarakat atas pengelolaan kebersihan. Tanpa peran serta dan kesadaran masyarakat, pemerintah tentu akan kesulitan dalam pengelolaan sampah," tutup Saif. (Par/Adv)

**DIREKTORAT JENDRAL
BEA DAN CUKAI**

**PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN**

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 dan perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, rokok ilegal meliputi

<p>ROKOK PITA CUKAI PALSU</p>	<p>ROKOK PITA CUKAI BERBEDA</p>
<p>ROKOK PITA CUKAI BEKAS</p>	<p>ROKOK POLOS ATAU TANPA PITA CUKAI</p>

**GEMPU
ROKOK
ILEGAL**

SANKSI PENGEDAR ROKOK ILEGAL

Pasal 54
Setiap orang yang memperjualbelikan rokok tanpa banderol (pita cukai) dipidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dan denda minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai

Pasal 56
Setiap orang yang memperjualbelikan rokok tanpa banderol (pita cukai) palsu atau tanpa pita cukai, dipidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai

Pasal 58
Setiap orang yang menjual, membeli menggunakan pita cukai kepada yang bukan haknya dipidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal 2 kali nilai cukai

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT ATAU HUBUNGI NOMOR 1500 225

Dr. Drs.H. SUPRAWOTO,SH,M.Si
BUPATI MAGETAN

Hj. NANIK ENDANG RUSMINIATI,M.Pd
WAKIL BUPATI MAGETAN

Iklan Layanan Masyarakat Ini Dipersembahkan Oleh : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan